



Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)

Available online <http://jurnalmahasiswa.uma.ac.id/index.php/jipikom>

Diterima: 20 April 2024; Direview: 23 April 2024; Disetujui: 19 Oktober 2024

Studi Komunikasi Digital: Sistem Literature Review

Digital Communication Studies: A System Literature Review

Anggie Nurfaisah*, Salahudin & Muhammad Firdaus

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas
Muhammadiyah Malang, Indonesia

Abstrak

Tujuan penulisan ini untuk meninjau literature secara sistematis agar menunjukkan trend terkait studi komunikasi digital. Pemilihan topik tentang komunikasi pemerintah melalui konten podcast menjadi penelitian yang strategis karena dapat memberikan implikasi atau manfaat bagi kehidupan negara yang demokrasi di masa depan. Oleh karena itu, peneliti menganggap hal ini sebagai isu penting dan tertarik untuk mempelajari dan menganalisis bagaimana komunikasi pemerintah era digital dibahas dan bagaimana implementasinya. Penelitian ini, menggunakan metode *Systematic Literature Review (SLR)* dengan sumber data dari jurnal internasional Scopus periode 2019-2023 (jumlah 195 artikel) serta menggunakan VOSviewer untuk mengelola data. Hasil penelitian menunjukkan beberapa konsep yaitu, komunikasi, internet, dan perkembangannya. Lalu, ditemukan pada era digital dapat memberikan dampak positif dan negatif dalam komunikasi pemerintah serta menunjukkan pentingnya pengetahuan masyarakat dalam memanfaatkan media digital dengan baik. Hasil penelitian, dapat dijadikan landasan untuk mengembangkan kajian komunikasi digital. Keterbatasan penelitian ini, hanya bersumber dari Scopus, maka penelitian selanjutnya harus menggunakan artikel ilmiah yang diambil dari database internasional yang terkenal seperti *Web of Science* dan *Dimensiond Scholars*.

Kata Kunci: Digital; Komunikasi; Politik; Podcast

Abstract

The purpose of this writing is to review the literature systematically to show trends related to the study of digital communication. The selection of topics about government communication through podcast content is strategic research as it can have implications or benefits for the life of a democratic country in the future. Therefore, researchers regard it as an important issue and are interested in studying and analyzing how government communication in the digital age is discussed and how it is implemented. This research uses the method of Systematic Literature Review (SLR) with data sources from the international journal Scopus for the period 2019-2023 (a total of 195 articles) as well as using VOSviewer to manage the data. The results of the research suggest several concepts, namely, communication, the Internet, and its development. Then, discoveries in the digital age can have a positive and negative impact on government communication as well as show the importance of public knowledge in using digital media. Research results can be used as a basis for developing digital communication studies. The limitations of this research, are only sources from Scopus, and then further research should use scientific articles taken from well-known international databases such as the Web of Science and Dimensions Scholars.

Keywords: Digital, Communication; Politics; Podcast

How to Cite: Nurfaisah, A., Salahudin & Firdaus, M., (2024), Digital Communication Studies: Sistem Literatur Review, *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)*, 6(2) 2024: 150-161,

*E-mail: anggienurfaisah@gmail.com

ISSN 2722-1148 (Online)



PENDAHULUAN

Dengan pesatnya perkembangan teknologi saat ini manusia memasuki era baru, yaitu era digital. Kemunculan jaringan internet menciptakan media baru, seperti media online, media sosial, buku elektronik, dan radio digital (Asmiyanto et al., 2021). Dengan perubahan yang terus berjalan, maka pemerintah maupun seluruh lapisan masyarakat harus beradaptasi. Peran digital akan sangat penting jika pemerintah dapat memanfaatkan dengan baik. Seperti yang disampaikan pada jurnal (Ariyanti et al., 2021) Pemerintah akan terdorong menciptakan inovasi baru dalam urusan kepentingan masyarakat. Tidak hanya itu, pemerintah harus membuat strategi dalam komunikasi politik. Seperti yang terjadi saat ini, sudah banyak birokrat menggunakan media sosial sebagai alternatif untuk menyampaikan informasi. Terlebih lagi, saat ini telah berkembang *content podcast* yang didalamnya ada narasumber sebagai lawan bicara dengan durasi yang cukup Panjang dan di unggah melalui platform Youtube misalnya sehingga dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman terkait kebijakan politik. Tentu hal ini membuat penyebaran informasi lebih luas dan masyarakat dapat mengakses kapan saja.

Dalam meningkatkan demokrasi, maka peran masyarakat sangat penting untuk menyampaikan kritik dan salah tentang kebijakan public ataupun isu politik. Lembaga eksekutif dan legislatif memiliki otoritas untuk menetapkan kebijakan yang didasarkan pada aspirasi masyarakat, yang dikenal sebagai kebijakan public (Mardhiah et al., 2021). Aspirasi masyarakat adalah bentuk komunikasi dengan pemerintah, maka untuk meningkatkan komunikasi yang berkualitas pemerintah memanfaatkan media sosial sebagai wadah aspirasi masyarakat. Karena, hakikatnya kebijakan publik yang dibuat pemerintah berdasarkan kebutuhan dan kondisi masyarakat. Saat ini, komunikasi memainkan peran penting dalam demokratisasi karena ada persaingan kekuasaan dan pemeliharaan kekuasaan, yang berarti bahwa komunikator memperluas kekuasaan mereka contohnya kampanye pemilihan umum calon presiden (Bazić & Minić, 2009). Melalui media baru, menjadi alternatif atau strategi untuk mengangkat isu atau program baru dalam meningkatkan kredibilitasnya sebagai pemimpin atau birokrat.

Komunikasi pemerintah sebelum era digital, masyarakat hanya bisa mengakses informasi dan menyampaikan aspirasi melalui media massa, seperti radio, televisi, dan surat kabar cetak. Namun, saat ini, telah mengalami perkembangan dan hampir seluruh masyarakat telah menggunakan platform digital. Masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya secara bebas melalui internet dan media sosial. Dampak positif lainnya dari internet dan media sosial adalah dapat digunakan untuk menginspirasi dan memotivasi serta dapat berkomunikasi secara langsung dengan pemerintah meskipun jarak yang jauh, namun hal tersebut dapat dilakukan melalui internet dan media sosial. Sedangkan dampak negatifnya, terjadinya penyalahgunaan platform digital sebagai wadah komunikasi yang menjadi hal biasa. Namun, di era digital harus diperhatikan oleh seluruh pengguna internet mulai dari etika dan tata krama dalam menyampaikan pemikirannya (Machmud et al., 2021).

Dalam hal ini, menunjukkan bahwa media digital akan menciptakan inspirasi dan inovasi seperti membuat konten *podcast* disajikan salah satunya melalui pendekatan cerita, yang berarti menyampaikan cerita kepada pendengar. Dengan begitu, tentu lebih banyak mengundang pendengar atau penonton sehingga mereka mendapat pengetahuan baru terkait mobilisasi pemerintahan (Hariguna & Ruangnanjanes, 2021). Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa konten *podcast* fokus pada berita dan informasi. Namun fungsi penting dalam komunikasi politik adalah dapat memberikan perspektif yang luas tentang perilaku politik. Dalam penelitian (Ratu et al., 2022), Salah satu cara untuk membangun citra politik adalah melalui komunikasi politik seperti ini, karena citra politik muncul melalui opini publik. Komunikasi politik melalui media massa tidak hanya menyebarkan informasi terkait himbuan tetapi juga pada saat pemilihan umum calon pemimpin dapat menggunakan media massa untuk menyampaikan visi misi yang dapat menarik suara masyarakat. Sejalan dengan penelitian (Ahmadi et al., 2023) strategi komunikasi yang harus diperhatikan adalah dengan mengedepankan kode etik dan narasumber. Topik yang belum banyak diketahui oleh masyarakat, terutama program kebijakan pemerintah, harus diangkat. Serta, *podcast* saat ini telah berkembang pesat di kalangan politisi, akademisi, dan artis. Banyak dari mereka sudah memiliki chanel di YouTube untuk memberikan informasi tentang hal-hal seperti politik, pendidikan, dan Kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa metode komunikasi di era digital dapat dikatakan sangat penting (Salim et al., 2023).

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk menelaah "perkembangan komunikasi politik era digital" dengan menggunakan metode analisis *System Literature review* (SLR) tematik yang bersumber dari *scopus* dengan pengolahan data *Vosviewer* dapat dapat mendukung penulisan ini serta dapat menganalisis secara lebih komprehensif dan komparatif. Berdasarkan pendahuluan di atas, penulis membahas masalah tentang bagaimana podcast menjadi populer dan menjadi sumber informasi utama bagi masyarakat. Pendekatan ini membedakannya dari penelitian sebelumnya yang dilakukan secara eksplisit. Penelitian ini tidak hanya dapat melengkapi penelitian sebelumnya, tetapi juga dapat memberikan ulasan menyeluruh sebagai bahan diskusi dan sumber referensi tambahan tentang studi komunikasi politik pada penelitian selanjutnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan *System Literatur Review*, yang mencakup berbagai teknik untuk pengelolaan bahan tulis, membaca dan mencatat, dan pengumpulan data yang bersumber dari *Scopus*. *System Literature Review* (SLR) merupakan metode atau pendekatan metodologis yang tersistematis dalam penyusunan maupun menganalisis literature pada topik penelitian. Artikel-artikel yang digunakan penulis sebagai referensi skala dan bereputasi internasional. Kajian penelitian ini didasarkan faktor mendasar dan dalam hal pemahaman konsep, pengaruh, serta paradigma terkait studi komunikasi digital. Peneliti menelaah dan mengulas penelitian terdahulu untuk menemukan korelasi agar mudah dipahami bagaimana penggunaan digital pada komunikasi pemerintah saat ini.

Pelaksanaan penelitian menggunakan prosedur PRISMA (*Preffered Reporting Items for Sustematic and Meta-Analysis*) karena tahapan-tahapan yang lengkap dan sistematis untuk melakukan kajian serta dapat membantu peneliti dalam memperbaiki laporan tinjauan secara sistematis dan meta-analisis (Amri et al., 2022). Lalu, tahapan pelaksanaan penelitian diawali dengan melakukan *research* artikel dengan kata kunci "*Digital Communication*" pada database *Scopus* tahun 2019-2023 teridentifikasi 195 artikel. Tahapan selanjutnya, memilah dan menyeleksi artikel yang mempunyai keterkaitan kuat diperoleh peneliti berdasarkan prosedur. Hal ini, dilakukan dengan memasukkan kata kunci "demokrasi digital" pada kolom pencarian, dengan pembatasan pada tahun 2019 hingga 2023. Berdasarkan proses *research*, terdapat 30,391 artikel yang sesuai dengan topik pembahasan peneliti terkait topik tersebut. Lalu, memasukkan dan mengekspor 195 artikel terkait "*Digital Communication*" dengan format RIS dan CSV. Setelah itu, impor artikel ke Aplikasi Mendeley dan dari Mendeley artikel dengan format RIS dan CSV tersebut kedalam Aplikasi *Vosviewer*. Serta, Review artikel dengan *Vosviewer* untuk di analisis dan dikaji lebih dalam.

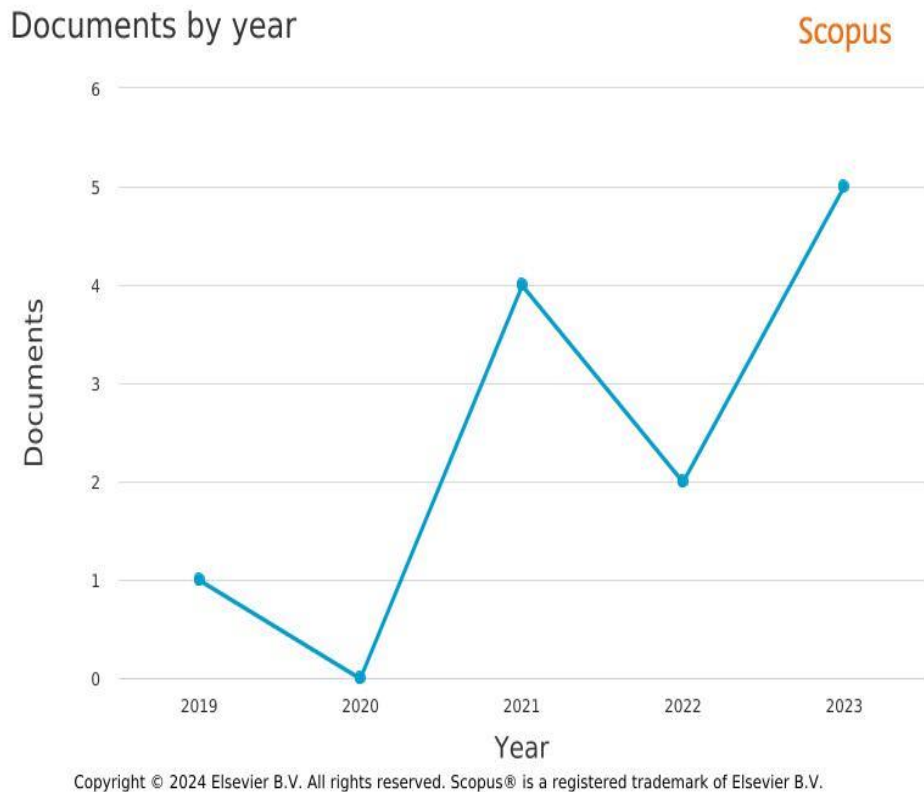
Tahapan terakhir, melakukan verifikasi terhadap berbagai artikel temuan untuk mengetahui apakah sudah benar berkaitan erat dengan topik studi komunikasi digital. Tujuan verifikasi tersebut untuk membatasi ilmu pengetahuan (*social sciences*), jenis dokumen (*article*), tahap publikasi (*final*), dan bahasa (*Inggris*). Hal ini akan menunjukkan hasil 195 artikel yang sangat relevan dengan studi komunikasi digital. Sehingga, artikel tersebut dapat dijadikan sebagai referensi dan mempelajari perihal komunikasi digital. Lalu, direview setelah proses tersebut mulai dari proses pencarian artikel, import artikel di software aplikasi, serta pemetaan topik diskusi. Setelah artikel sesuai dengan topik penelitian, lalu dibuat ringkasan artikel yang lengkap. Ringkasan ini mencakup informasi penting seperti nama peneliti, tahun publikasi, desain penelitian, tujuan penelitian, sampel, instrumen, dan hasil singkat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Data

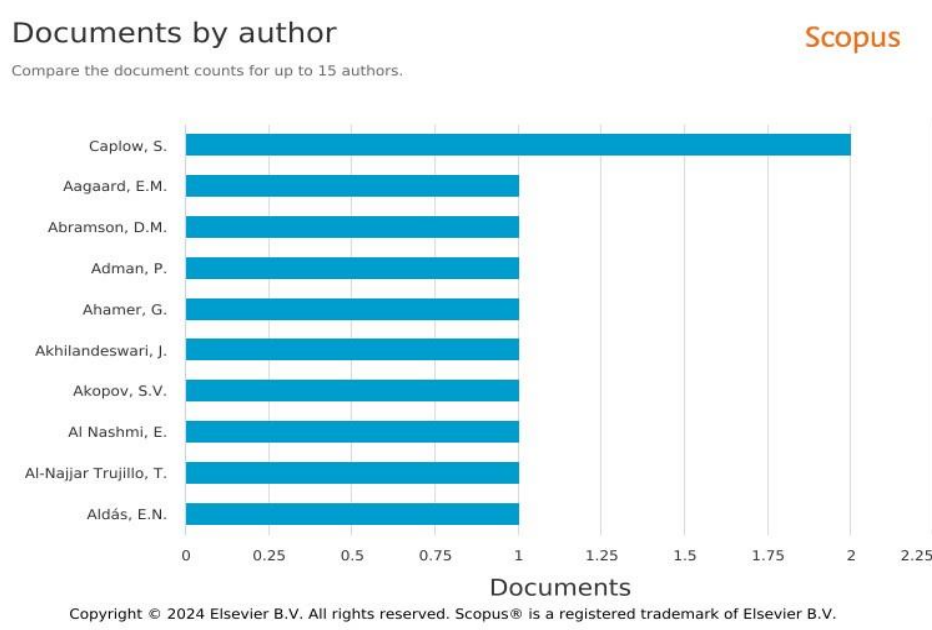
Konsep komunikasi dalam beberapa literature bertakjuk pada sudut pandang teoretis yang berharga mengenai komunikasi pemerintah yang *pertama*, penekanan pada eksplorasi dan kepekaan terhadap konteks kelembagaan dan social. *Kedua*, perhatian terhadap permasalahan normatif mengenai bagaimana komunikasi menjalankan fungsi sipilnya sebagai pusat kehidupan sosial dan politik dan perhatian terhadap membentuk komunikasi agar dapat melayani proses demokrasi dengan lebih baik. Namun, bagaimana tujuan pemerintah ketika berkomunikasi dengan warganya ditujukan untuk membangun demokrasi? Pemerintah tidak mungkin seterusnya menggunakan kotak suara sebagai wadah aspirasi masyarakat, pemerintah tidak bisa

menyebut negaranya demokrasi jika hanya melihat Masyarakat sudah berpartisipasi pada pemilu. Karena komunikasi yang sebenarnya adalah bagaimana pemerintah mengirim dan menerima *feedback* dari Masyarakat. Di era digital saat ini pemerintah dapat berkomunikasi dengan Masyarakat secara intensif. Berdasarkan temuan artikel dengan topik studi komunikasi digital termasuk jenis kajian yang cukup banyak diminati. Gambar 1 menunjukkan bahwa pada tahun 2019 hingga tahun 2020 secara umum mengalami penurunan dan mengalami peningkatan di tahun 2021. Gambar dibawah ini menunjukkan tidak stabilnya penelitian mengenai *Digital communication studies*. Selanjutnya tahun terbitnya artikel terbanyak adalah tahun 2023.



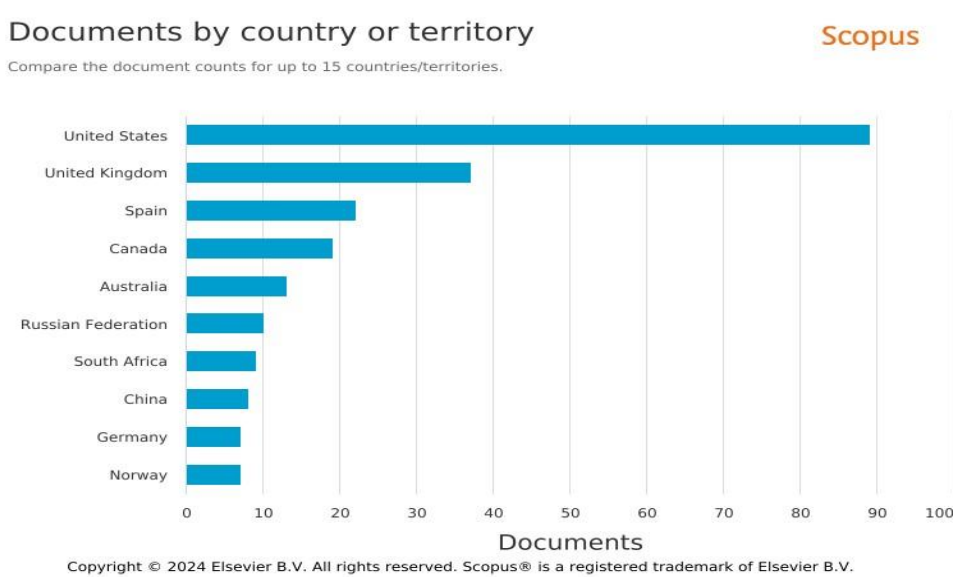
Gambar 1. Jumlah studi tentang *Digital Communication Studies* pada tahun 2019-2023
(Sumber: Scopus)

Pada Gambar 1 menunjukkan bahwa author banyak melakukan penelitian mengenai perkembangan komunikasi pemerintah baik skala nasional maupun internasional. Disini peneliti mengambil dokumen 5 tahun terakhir periode 2019-2023, pada tahun 2019 awal mula terjadinya Pandemi Covid-19 yang melanda hampir seluruh negara dunia, dan pada masa itulah komunikasi pemerintah melalui media massa menjadi opsi atau alternatif untuk menghimbau masyarakat dan disitulah author mulai banyak melakukan penelitian terkait komunikasi digital. Pada tahun 2020 mengalami stagnan dimana author tidak melakukan penelitian terkait *digital communication*. Lalu, mengalami peningkatan yang signifikan di tahun 2021 dengan jumlah 4 artikel yang berkaitan dengan topik pembahasan ini. Tahun 2022 mengalami penurunan dan meningkat Kembali di tahun 2023 dengan jumlah 5 artikel. Meskipun mengalami ketidakstabilan, pembahasan komunikasi digital akan tetap eksis karena setiap tahun menunjukkan perubahan atau perkembangan yang membuat author melakukan penelitian. Dengan begitu jumlah artikel akan tetap meningkat pada skala internasional secara keseluruhan database Scopus. Serta, dengan adanya artikel tersebut dapat menjadi kontribusi bagi para peneliti selanjutnya dan dapat dijadikan sumber referensi untuk mendukung penelitian selanjutnya dalam mensinkronkan topik pembahasan yang berjudul "*Digital Communication Studies*".



Gambar 2. Jumlah dokumen tentang *Digital Communication Studies* oleh peneliti (Sumber: Scopus)

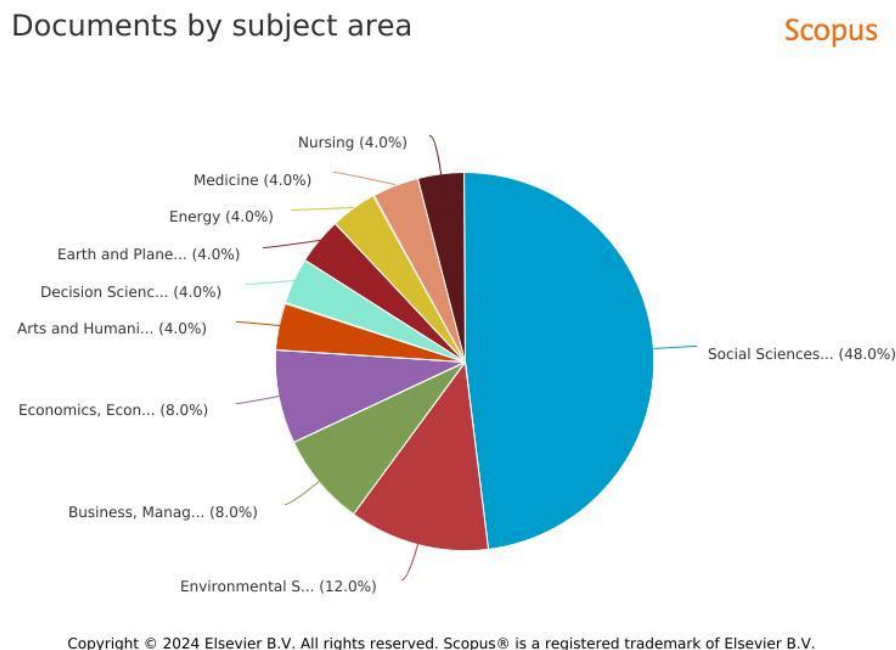
Gambar 2 menunjukkan jumlah penelitian yang dilakukan author adalah Caplow, S. sebanyak 2 dokumen artikel ilmiah serta dalam isi pembahasan juga saling berhubungan dengan author lainnya. Dalam penelitian Caplow memuat komitmen terhadap komunikasi terbuka dan bijak terhadap perbedaan ideologi, keterampilan yang dapat dan harus diajarkan di pendidikan tinggi. Adapun author lainnya yang melakukan penelitian terkait "*Digital Communication Studies*" yang menghasilkan 1 artikel terdiri dari Aagaard, Abramson, Adman, Ahamer, Akhilandeswari, Akopov, Al Nashmi, Al-Najjar Trujillo, dan Aldas. Berdasarkan hasil data yang didapat menunjukkan relasi yang dapat menjadi pendukung peneliti terhadap topik pembahasan yang dikaji. Maka, dapat dijadikan sebagai referensi atau acuan untuk mengelaborasi hasil penelitian author dengan topik pembahasan "*Digital Communication Studies*". Dalam hal ini, tentu sangat membantu untuk meningkatkan jumlah artikel pada database Scopus yang dapat digunakan sebagai sumber referensi penelitian selanjutnya.



Gambar 3. Jumlah dokumen tentang *Digital Communication Studies* berdasarkan negara (Sumber: Scopus)

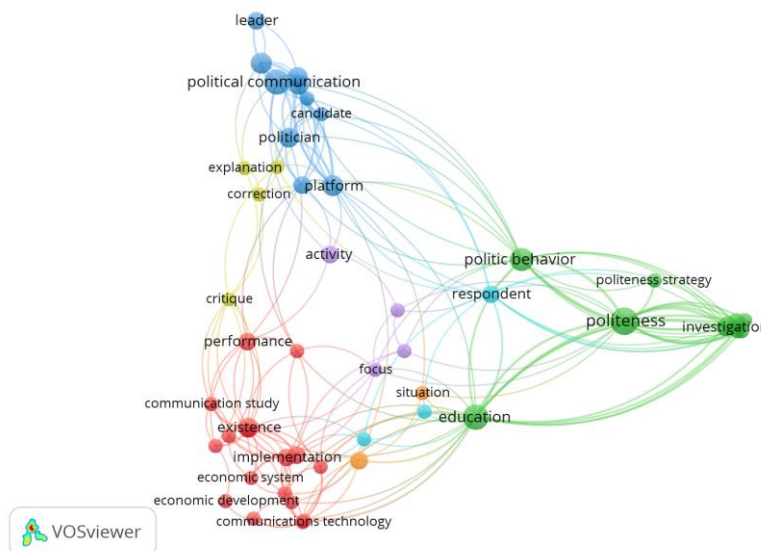
Dalam Gambar 3 tersebut negara United States (US) menjadi urutan teratas dengan jumlah dokumen sebanyak 89 yang meneliti terkait perkembangan komunikasi pemerintah untuk skala Internasional, dengan begitu peneliti dapat mengetahui dan menganalisis perkembangan

pemerintah luar negeri menggunakan media massa sebagai penyebaran informasi. Urutan kedua, adalah United Kingdom (UK) dengan jumlah 37 dokumen jurnal ilmiah yang dilakukan author, dalam dokumen tersebut secara umum membahas pemanfaatan teknologi di negara tersebut sangat penting dalam pelaksanaan tata Kelola pemerintahan. Negara Spain, menghasilkan dengan jumlah sebanyak 22 dokumen jurnal ilmiah terkait komunikasi politik. Negara Canada, menghasilkan dengan jumlah sebanyak 19 dokumen jurnal ilmiah. Australia menghasilkan dengan jumlah sebanyak 13 dokumen jurnal ilmiah. Russian Federation menghasilkan dengan jumlah sebanyak 10 dokumen jurnal ilmiah. South Afrika menghasilkan dengan jumlah 9 dokumen jurnal ilmiah. China menghasilkan dengan jumlah sebanyak 8 dokumen jurnal ilmiah. Selanjutnya Germany dan Norway menghasilkan dokumen dengan jumlah yang sama yaitu sebanyak 7 dokumen jurnal ilmiah perihal komunikasi politik era digital. Artikel jurnal yang dihasilkan oleh author berdasarkan negara dapat menambah pengetahuan baru atau terobosan yang sangat berkaitan dengan penelitian kedepannya.



Gambar 4. Jumlah dokumen tentang *Digital Communication Studies* berdasarkan subject peneliti (Sumber: Scopus)

Pada Gambar.4 *subject area* menampilkan warna yang berbeda-beda hal ini menunjukkan subject berdasarkan masing-masing warna. Gambar tersebut menunjukkan subject yang paling dominan adalah *social sciences* 48% karena penulis membahas tentang komunikasi pemerintah tentu didalamnya memuat ilmu social yang menyangkut pada masyarakat luas. Sinkron dengan topik pembahasan terkait "*Digital Communication Studies*" agar dapat terhubung diantara pemerintah dan masyarakat, maka harus melakukan perubahan komunikasi dengan cara memanfaatkan teknologi untuk memberikan informasi social politik maupun kondisi lingkungan sesuai kebutuhan. Subject *environmental* 12% menunjukkan interaksi dan keselarasan serta bagaimana kualitas hidup Masyarakat. Subject *Bussiness* dan ekonomi memiliki persentase yang sama 8% karena memiliki kaitan yang kuat. Komunikasi digital umumnya dilakukan untuk bisnis atau ekonomi namun berdasarkan penelitian menunjukkan komunikasi digital juga perlu diterapkan pada aspek pemerintahan. Lalu subject *decision sciences*, *earth and planet*, *energy*, dan *nursing* menunjukkan kesamaan persentase yakni 4%. Subject-subject tersebut saling berkaitan kuat sehingga membentuk konsep atau topik pembahasan yang dapat dikaji secara mendalam oleh peneliti.



Gambar 5. Kluster topik tentang *Digital Communication Studies* (Sumber: Scopus)

Tabel 1. Pengelompokan Tema berdasarkan kluster

Kluster	Konsep	Total
Kluster 1	<i>Political communication, leader, politician, platform, and candidate</i>	5
Kluster 2	<i>Critique, explanation, and correction</i>	3
Kluster 3	<i>Activity, focus</i>	2
Kluster 4	<i>Situation</i>	1
Kluster 5	<i>Politic behavior, education, politeness, politeness strategy, and investigation</i>	5
Kluster 6	<i>Respondent</i>	1
Kluster 7	<i>Existence, implementation, performance, communication studi, economic system, economic development, and communication technology</i>	7

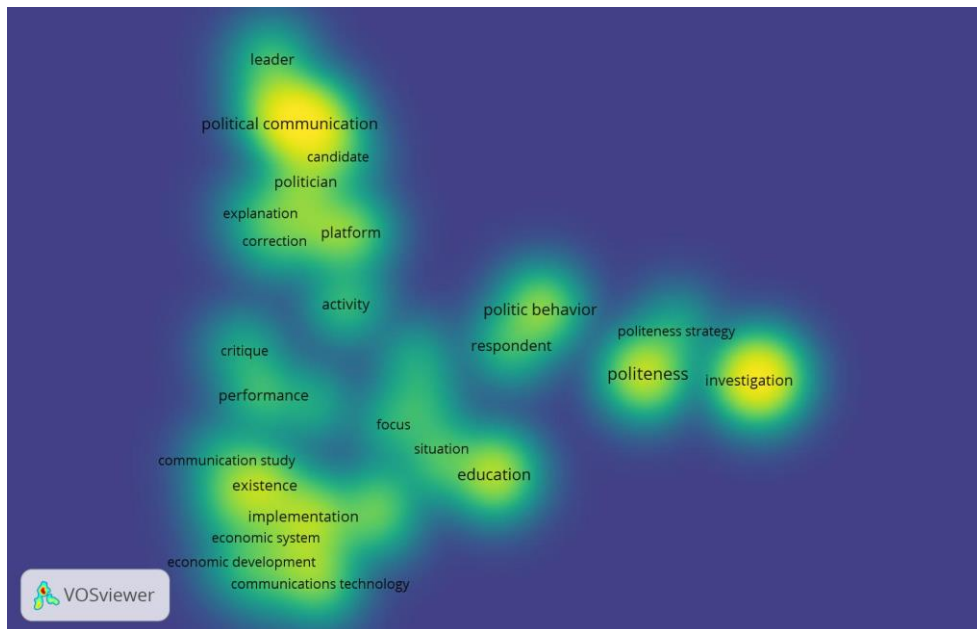
(Sumber: Scopus)

Pada tabel 1 menunjukkan pengelompokan kluster berdasarkan konsep yang paling kuat relasinya dengan pembahasan peneliti. Gambar 5 menunjukkan tampilan jejaring konsep yang saling berhubungan dengan kluster lainnya. Dari semua kluster tentu konsepnya saling berkaitan, yang membedakan hanya kelompok konsep yang satu dengan kelompok konsep lainnya yang di kaji oleh peneliti. Dalam hal ini, tentu akan memudahkan peneliti untuk mengelompokkan konsep berdasarkan kluster dengan membuat tabel. Konsep tersebut bersumber dari Scopus yang diolah dengan aplikasi VOSviewer sehingga menampilkan gambar diatas. Dominasi topik dilihat dari ketebalan warna pada kluster tersebut yang mana menunjukkan relasi dengan topik pembahasan yang dilakukan oleh peneliti berjudul "*Digital Communication Studies*". Hal ini menjadi pendukung bahwa adanya relasi kuat terhadap peneliti berdasarkan referensi dari Scopus. Pada kluster 1 adalah warna biru tua yang banyak membahas tentang *political communication* yang dilakukan pemerintah dalam menyampaikan informasi dan seringkali melalui media digital seperti konten *podcast*. Hal ini menunjukkan, bahwa topik internet mempunyai frekuensi atau sering disebutkan paling tinggi.

Pada kluster 2 adalah warna kuning dengan dominasi kata konsep *critique* atau kritik, dalam dalam penggunaan media sosial sebagai media informasi tentu akan memunculkan pendapat atau kritikan publik yang berkaitan kebijakan ataupun pelayanan publik, maka pemerintah selaku actor harus memberikan penjelasan (*explanation*) kepada public. Sehingga, publik akan mengkoreksi (*correction*) dan menilai informasi yang ada kaitannya dengan kebijakan dan pelayanan public relevan atau tidak. Lalu, kluster 3 adalah warna ungu yang menunjukkan kata konsep *activity*, bahwasannya kegiatan pemerintah di era digital Sebagian besar beralih pada penerapan teknologi untuk mempermudah. Saat ini, komunikasi politik cenderung *focus* pada pemanfaatan media social sebagai media informasi. berdasarkan referensi scopus secara umum menyebutkan bahwa pemerintah didorong untuk memanfaatkan teknologi sebagai media

komunikasi politik dalam memberikan informasi secara luas dan merata. Kehadiran teknologi sebagai jaringan digital dapat memperkuat komunikasi dan demokrasi karena masyarakat dapat berpartisipasi secara online.

Selanjutnya, klaster 4 adalah warna orange disitu kata konsep utama adalah *situation*, di era digitalisasi yang semakin pesat tentu pemerintah harus menyesuaikan bagaimana menyampaikan informasi terkait isu politik. Klaster 5 adalah warna hijau, dengan kata konsep utama *political behavior* yang menunjukkan bahwa pentingnya membangun perilaku politik yang baik dalam menyampaikan dan menerima informasi kebijakan publik. Sejalan dengan perkembangan digital, pemerintah harus memberikan perhatian seperti memberikan *education* publik agar lebih bijak dan sopan (*politeness*) dalam menyampaikan kritik maupun saran. Pada klaster 6 adalah warna biru muda dengan kata konsep *respondent*, bahwa pemerintah memberikan wadah kepada publik untuk merespon dengan menyampaikan kritik maupun saran mengenai kebijakan dan pelayanan publik. Terakhir klaster 7 adalah warna merah dengan kata konsep *existence*, sejauh ini dengan adanya media social masih berpengaruh signifikan dalam menjangkau informasi dengan cepat dan luas. Implementasi media social tentu didukung strategi komunikasi yang baik mulai dari penggunaan tata bahasa yang baik dan santun serta yang mudah dipahami dalam berkomunikasi politik. Namun, yang terpenting adalah menciptakan kesadaran publik untuk berpartisipasi dan menerapkan prinsip demokrasi melalui *education communication* dapat menunjukkan seberapa pentingnya kualitas komunikasi politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.



Gambar 6. Visualisasi kepadatan studi tentang *Digital Communication Studies*
(Sumber: Scopus)

Pada gambar 6 menunjukkan visualisasi kepadatan topik pembahasan terkait "*Digital Communication Studies*" dengan menampilkan gradasi warna. Ketebalan warna menunjukkan bahwa topik yang paling sering dibahas dalam penelitian. pada gambar 6 menunjukkan warna kuning yang paling tebal dengan konsep *political communication*, berdasarkan artikel dari database Scopus kerap kali membahas terkait komunikasi politik komunikasi pemerintah dengan memanfaatkan teknologi digital. Selain itu, dengan tren saat ini yang berpengaruh bagi dunia politik adalah konten *podcast* yang menjadikan hampir semua orang lebih tertarik untuk mendengarkan dan menonton. Model komunikasi pemerintah saat ini dengan menggunakan media social untuk menyampaikan sumber informasi. Tidak hanya sebagai sumber informasi tetapi juga sebagai opsi *investigation* secara online yang mana lebih cepat dan cakupannya luas untuk mendapatkan informasi atau isu politik. Namun, dengan adanya perkembangan digital yang semakin pesat tentu harus diimbangi dengan memberikan *education* atau pendidikan politik untuk menghindari kegagalan pemahaman (Ma et al., 2023).

Karena, dalam *Implementation* atau pelaksanaannya banyak dari masyarakat gagal paham dengan adanya penyampaian informasi terkait kebijakan publik sehingga mereka cenderung berasumsi sendiri dan menimbulkan kritikan dengan bahasa yang kurang baik. Maka, untuk menciptakan kualitas komunikasi politik yang baik perlu memperhatikan *political behavior* yang mana pemerintah mendisiplinkan yang berkaitan dengan politik berdasarkan analisis pemikiran dan perilaku individu dalam merespon informasi penting. *Existence* komunikasi politik era digital sangat berpengaruh hingga saat ini. Adanya perkembangan media yang semakin maju membuat aktor politik atau birokrat terdorong inovatif dalam menyampaikan informasi yang di kemas secara menarik seperti konten *podcast* pastinya menjadi peluang dalam menyebarkan informasi penting tentang politik. Secara tidak langsung seluruh lapisan masyarakat mendapat pengetahuan dan pemahaman baru. Jika dilihat dari segi positif dan negatif dalam memanfaatkan digital teknologi sebagai media komunikasi menjadi daya tarik author untuk mengkaji.

Diskusi Hasil

Jika menganalisis secara mendalam tentang bagaimana komunikasi pemerintah beroperasi dalam sejumlah konteks tertentu, menjelaskan tren yang dapat diidentifikasi sebagai hal yang umum terjadi di berbagai negara. Perbandingan artikel-artikel yang ditunjukkan pada Gambar 1 terletak pada pertanyaan penelitian umum yang dieksplorasi di setiap negara melalui metodologi studi kasus. Hal ini sangat disadari kesulitan upaya untuk memerlukan pengetahuan mendalam tentang dunia yang diteliti serta kepekaan terhadap perbedaan bahasa dan makna. Selain itu, keterbatasan pendekatan ini namun yakin bahwa upaya ini layak dilakukan (Komar & Oksiyenko, 2023). Berdasarkan popularitas pemimpin atau pemerintahan pada persepsi publik terhadap kebijakan publik, sejauh ini belum ada penelitian yang dilakukan mengenai apa arti reputasi pemimpin publik juga belum ada upaya yang dilakukan untuk membangun reputasi lembaga-lembaga pemerintah dan para pemimpinnya.

Studi ini menunjukkan bahwa pembahasan artikel tersebut paling relevan dengan topik peneliti tentang "*Studi Communication Digital*", bahwasannya membangun komunikasi digital harus memiliki strategi atau nilai-nilai untuk menerapkannya. Khususnya pada aspek politik, tentu pemerintah harus mengintegrasikan segala informasi melalui media sosial sebagai bentuk kesetaraan dan keadilan (Aldás et al., 2019). Serta, saling memudahkan untuk berkomunikasi antara pemerintah dengan masyarakat yang jaraknya jauh karena kemudahan dalam mengakses. Kemudahan akses ini tentunya dapat digunakan untuk menyuarakan pendapat, memperoleh informasi, dan memobilisasi masyarakat mengenai topik-topik penting dalam demokrasi. Berkenaan dengan ruang lingkup dalam penelitian yang dilakukan berbagai author bahwa media memainkan peran sentral dengan menghubungkan komunikasi pemerintah dengan konsep penyebaran informasi, program pembangunan, dan pembingkai berita pemerintah (reputasi pemerintah).

Saat ini, ruang lingkup komunikasi pemerintah harus melampaui hubungan media dan mencakup aktivitas lain seperti reputasi dan manajemen isu serta membangun hubungan menyiratkan pendekatan komunikasi strategis. Dalam penelitian (Antypas et al., 2023) memaparkan media sosial telah menjadi sangat berpengaruh dalam pengambilan kebijakan di masyarakat modern, terutama di negara-negara barat seperti US dimana platform seperti Twitter memungkinkan penggunaannya untuk mengikuti politisi, sehingga membuat masyarakat lebih terlibat dalam diskusi politik. Demikian pula, para politisi menggunakan Twitter untuk mengekspresikan pendapat mereka, berdiskusi mengenai isu terkini dan mempromosikan agenda politik mereka yang bertujuan untuk mempengaruhi perilaku pemilih. Sejalan dengan penelitian (Barroso-Moreno et al., 2023) Media sosial dapat berkontribusi terhadap masyarakat inklusif, namun media sosial juga merupakan ruang komunikasi yang asimetris dan terpolarisasi.

Selanjutnya, subject peneliti yang ditampilkan pada Gambar 4 menunjukkan dari beberapa jurnal yang digunakan sebagai referensi dominan membahas tentang *social sciences* 48% tetapi saling berkaitan dengan subject lainnya. Pada pembahasan "*Digital Communication*" tentu cenderung pada ilmu social atau social sciences dimana ada hubungannya dengan masyarakat. Komunikasi digital yang dilakukan pemerintah dalam menyampaikan informasi politik sasarannya adalah masyarakat, yang mana masyarakat sebagai pihak yang memilih dan memutuskan. melalui media social sebagai bentuk jembatan untuk menghubungkan pemerintah dengan masyarakat. Untuk menerapkan komunikasi digital tentu pemerintah harus memiliki strategi komunikasi yang dapat diterima oleh masyarakat. Seperti pembuatan konten *podcast*

yang diunggah melalui Youtube tentu menjadi trobosan untuk meningkatkan komunikasi dengan masyarakat. Selain masyarakat mendapatkan pengetahuan baru, namun pemerintah menjadi lebih bijak dan bertanggungjawab atas informasi politik yang disampaikannya. Sejalan dengan penelitian (Cladis, 2020) karena pasti ada yang namanya jejak digital, jadi apabila ada kesalahan dalam penyampaian informasi tentu tetap ada jejaknya dan tentu pasti sudah dipertimbangkan perihal ini.

Serta, pada tabel 1 dan gambar 5 diatas menampilkan pengelompokan konsep berdasarkan klaster tentang "*Digital Communication Studies*" yang menunjukkan beberapa warna dengan tingkat ketebalan dan lingkaran paling besar disitu menunjukkan topik tersebut banyak di telaah dan dikaji oleh peneliti. Pada tabel 1 diatas cukup jelas untuk menunjukkan tentang bagaimana konsep-konsep tersebut dikelompokkan, diurutkan dan ditinjau dengan kelompok yang benar-benar memiliki relasi kuat berdasarkan klaster yang dibahas. Gambar 5 menunjukkan bagaimana jejaring konsep-konsep tersebut berdasarkan klaster saling berkaitan satu sama lain, serta menunjukkan tingkat dominasi konsep yang paling sering dikaji sesuai ketebalannya. Perihal *Digital Communication Studies* menurut (Gil & Armenta, 2022) digitalisasi mengacu pada kompetensi digital yang memungkinkan orang memahami, menavigasi, berpartisipasi, berinteraksi, dan mengubah diri mereka sendiri serta masyarakat dengan cara yang etis dan aman. Studi ini, berupaya melakukan meta-analisis yang mengkategorikan berbagai produk penelitian ilmiah mengenai kewarganegaraan digital, dengan penekanan pada proses pendidikan pembangkitan dan penerapan pengetahuan. Namun, dalam penelitian (Musdalifah et al., 2023) tidak hanya itu tetapi penggunaan digitalisasi untuk mengumpulkan data diperoleh melalui social media seperti Instagram, Twitter, dan lain sebagainya dengan menggunakan teknik perayapan web dan dimaksudkan untuk digunakan untuk tujuan analisis konten. Temuan studi ini, menunjukkan bahwa pemerintah daerah menerapkan beragam strategi komunikasi risiko. Hal ini menjadi langkah-langkah pemerintah, inisiatif untuk pendidikan publik, upaya keterlibatan masyarakat, informasi tentang bantuan yang dapat diakses, penegakan peraturan, penyediaan bantuan emosional, dan promosi upaya berkolaboratif.

Pada gambar terakhir menunjukkan Visualisasi kepadatan studi tentang *Digital Communication Studies*, warna yang paling terang menunjukkan topik *change* yang kerap menjadi kajian. Dalam penelitian ini menunjukkan, bahwa melaksanakan komunikasi publik menjadi penting dalam penanganan suatu masalah baik sebagai upaya pencegahan maupun sebagai bentuk persuasi untuk melakukan penertiban publik. Contohnya, pada masa pandemi pemerintah mengintegrasikan komunikasi dalam konteks himbauan maupun informasi seputar politik melalui media social (Nurjanah, 2023). Tentunya pemerintah melakukan perubahan secara komprehensif dengan memaksimalkan penggunaan media social sebagai media untuk menyampaikan komunikasi. Seiring berjalannya waktu, populernya tren konten *podcast* yang membuat pemerintah terdorong untuk mendokumentasikan kegiatannya, menyampaikan edukasi atau informasi penting dalam bentuk video dengan durasi cukup panjang serta diunggah melalui kanal Youtube resmi. Maka, seluruh masyarakat dapat mengakses secara fleksibel dengan mengaktifkan jaringan internet. Dalam penelitian ini, menunjukkan pentingnya perubahan komunikasi publik dengan memanfaatkan media digital secara komprehensif dan pemantauan dari pemerintah dalam hal etika dan berbahasa yang baik untuk membangun kewarganegaraan yang kritis (Gonzalez-Mohino et al., 2023).

SIMPULAN

Penelitian ini memaparkan beberapa kajian dominan terkait demokrasi digital. Beberapa aspek terpenting dalam komunikasi digital adalah kehadiran internet mempunyai banyak implikasi terhadap pola komunikasi pemerintah. Kajian tentang *Digital Communication Studies* sangat relevan perkembangan globalisasi yang semakin pesat sehingga sangat penting dan perlu dipublikasikan dengan luas. Penelitian ini memaparkan beberapa temuan utama, bahwa komunikasi pemerintah melalui konten *Podcast* maupun platform lainnya memberikan dampak positif dan negatif serta menunjukkan tentang pentingnya pengetahuan masyarakat dalam memanfaatkan media digital dengan baik. Dilihat dari dampak positifnya adalah memberikan kemudahan akses ini tentunya dapat digunakan untuk menyuarakan pendapat, memperoleh informasi, dan memobilisasi masyarakat mengenai topik-topik penting dalam kebijakan publik. Sedangkan dampak negatifnya, terjadinya penyalahgunaan platform digital sebagai wadah

komunikasi yang menjadi masalah krusial. Namun, di era digital harus diperhatikan oleh seluruh pengguna internet mulai dari etika dan tata krama dalam menyampaikan pemikirannya.

Maka dalam hal ini, peran pemerintah sangat dibutuhkan untuk mengatasi masalah tersebut. Pemerintah harus lebih meminimalisir terjadinya penyalahgunaan dengan lebih mengamankan server lebih kuat. Serta, dalam hal berperilaku ketika menyampaikan pendapat tentu harus memberikan edukasi melalui literatur pendidikan. Karena, dengan menerapkan nilai atau etika dalam berkomunikasi sebagai cerminan bahwa informasi yang disampaikan dapat dipertanggungjawabkan. Masyarakat dapat berpartisipasi baik dalam menyampaikan pendapat maupun memantau informasi di media, hal ini merupakan kunci untuk menganalisis tujuan komunikasi pemerintah. Pada penelitian ini, cenderung membahas konten *Podcast* yang telah diterapkan oleh pemerintah atau birokrat karena menyesuaikan tren dalam menyampaikan informasi penting seperti kebijakan public ataupun kampanye politik. Sehingga, penelitian ini bermanfaat dan berguna untuk menunjukkan perkembangan akan komunikasi digital pada tingkat global. Penelitian ini, juga dapat dijadikan sebagai rujukan untuk penelitian selanjutnya, meskipun juga dibatasi oleh fakta bahwa sumber referensi hanya berasal dari database Scopus sehingga tidak ada *comparison* atau perbandingan data.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, D., Sulaiman, A. I., Runtiko, A. G., Noegroho, A., Ar Raqi, R. I., Maryani, A., Yuniati, Y., & Yulianita, N. (2023). Marketing Communications for Tourism Development in Ecoethno Leadcamp Site. *Studies in Media and Communication*, 11(4), 67–77. <https://doi.org/10.11114/SMC.V11I4.5909>
- Aldás, E. N., Farné, A., & Al-Najjar Trujillo, T. (2019). Social justice, cultures of peace and digital competences: Communication for critical global citizenship in higher education. *Revista Internacional de Educacion Para La Justicia Social*, 8(1), 43–62. <https://doi.org/10.15366/RIEJS2019.8.1.003>
- Amri, M., Chatur, A., & O'Campo, P. (2022). An umbrella review of intersectoral and multisectoral approaches to health policy. *Social Science and Medicine*, 315. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2022.115469>
- Antypas, D., Preece, A., & Camacho-Collados, J. (2023). Negativity spreads faster: A large-scale multilingual twitter analysis on the role of sentiment in political communication. *Online Social Networks and Media*, 33. <https://doi.org/10.1016/j.osnem.2023.100242>
- Ariyanti, S., Suryanegara, M., & Ramli, K. (2021). The Challenges and Opportunities of Visible Light Communication (VLC) Implementation in Indonesia. In A. K., S. E.R.E., & W. R.A. (Eds.), *Proceeding - 2021 2nd International Conference on ICT for Rural Development, IC-ICTRuDev 2021*. Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. <https://doi.org/10.1109/IC-ICTRuDev50538.2021.9656527>
- Asmiyanto, T., Ferezagia, D. V., Inamullah, M. H., Abdurrahman, Z., & Roselina, E. (2021). The Effect of Information-Seeking Behavior on Gen-Z Political Preference: Study on 2020 District Heads Election in Depok and South Tangerang. *Library Philosophy and Practice*, 2021, 1–17. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85120303930&partnerID=40&md5=06fa12dd54f0911455b5ba17004bfb3b>
- Barroso-Moreno, C., Rayon-Rumayor, L., & García-Vera, A. B. (2023). Big Data and Business Intelligence on Twitter and Instagram for digital inclusion. *Comunicar*, 30(74), 45–56. <https://doi.org/10.3916/C74-2023-04>
- Bazić, J., & Minić, V. (2009). The global affects of scientific-technological revolution on the social alternations. *Informatologia*, 42(3), 228–232. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-70450248476&partnerID=40&md5=6c86413b8ac4e798bcc3947954cd0821>
- Cladis, A. E. (2020). A shifting paradigm: An evaluation of the pervasive effects of digital technologies on language expression, creativity, critical thinking, political discourse, and interactive processes of human communications. *E-Learning and Digital Media*, 17(5), 341–364. <https://doi.org/10.1177/2042753017752583>
- Gil, J. G. R. R., & Armenta, J. A. (2022). Meta-analysis on digital citizenship in Ibero-America: Emphasis on education. *EduTec*, 82, 91–103. <https://doi.org/10.21556/edutec.2022.82.2593>
- Gonzalez-Mohino, M., Rodriguez-Domenech, M. Á., Callejas-Albiñana, A. I., & Castillo-Canalejo, A. (2023). Empowering Critical Thinking: The Role of Digital Tools in Citizen Participation. *Journal of New Approaches in Educational Research*, 12(2), 258–275. <https://doi.org/10.7821/naer.2023.7.1385>
- Hariguna, T., & Ruangkanjanases, A. (2021). Public behavior as an output of e-government service: the role of new technology integrated in e-government and antecedent of relationship quality. *Sustainability (Switzerland)*, 13(13). <https://doi.org/10.3390/su13137464>
- Komar, V., & Oksiutenko, K. (2023). DIGITALIZATION OF EDUCATIONAL AND SCIENTIFIC PROCESSES IN THE UKRAINIAN PUBLIC DISCOURSE (1991 – 2023). *East European Historical Bulletin*, 2023(29), 184–200. <https://doi.org/10.24919/2519-058X.29.292933>

- Ma, J., Zhang, Z., Chen, M., Gu, P., & Wang, B. (2023). Study on Application of Information and Communication Technologies to Chinese Curriculum Ideology and Politics. *Proceedings of the 2023 IEEE 3rd International Conference on Advanced Learning Technologies on Education and Research, ICALTER 2023*. <https://doi.org/10.1109/ICALTER61411.2023.10372946>
- Machmud, M., Irawan, B., Karinda, K., & Susilo, J. (2021). Analysis of the intensity of communication and coordination of government officials on twitter social media during the Covid-19 handling in Indonesia. *Academic Journal of Interdisciplinary Studies*, 10(3), 319–334. <https://doi.org/10.36941/AJIS-2021-0087>
- Mardhiah, A., Puspasari, C., Maisyura, M., & Ameliany, N. (2021). Political Communication Channels Of The Aceh Woman Legislative Member In Conveying Information To The Community. *Library Philosophy and Practice*, 2021. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85104771778&partnerID=40&md5=005a50e6ce852d38cdf22d303721568f>
- Musdalifah, F. S., Nasyaya, A., & Santoso, A. D. (2023). Digital Voices in Early Days: Analysing Local Government Social Media Approaches to Risk Communication During the Initial Stages of the COVID-19 Pandemic in Indonesia. *Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication*, 39(4), 126–149. <https://doi.org/10.17576/JKMJC-2023-3904-07>
- Nurjanah, A. (2023). PUBLIC COMMUNICATION THROUGH SOCIAL MEDIA DURING THE COVID-19 PANDEMIC IN SLEMAN REGENCY, YOGYAKARTA. *Public Policy and Administration*, 22(4), 609–626. <https://doi.org/10.13165/VPA-23-22-4-16>
- Ratu, A., Susilowati, E., & Moerad, S. K. (2022). Predicting the sharing and reception of COVID-19-related information on social media. *International Journal of Public Health Science*, 11(3), 1008–1017. <https://doi.org/10.11591/ijphs.v11i3.21117>
- Salim, H., Waterworth, P. G., Daud, A., & Hanif, M. (2023). The Integration of Digital Technologies into Practicum Classrooms by Smartphone-Savvy Pre-Service Teachers in Indonesia. *European Journal of Educational Research*, 12(2), 593–603. <https://doi.org/10.12973/EU-JER.12.2.593>